

## KEPEMIMPINAN DI KALANGAN MASYARAKAT PEDESAAN (Peran Ulama/Kiyai)

Oleh: H. Imran Sarman\*

### Abstrak

Masyarakat pedesaan dengan segala kesederhanaannya secara formal dipimpin oleh kepala desa (*Formal Leader*). Pemimpin semacam ini memiliki legalitas, wewenang dan tugas yang dibatasi oleh perundang-undangan yang berlaku. Di samping *Formal Leader* terdapat pula pemimpin yang keberadaannya mendapat *legitimasi* (pengakuan) oleh masyarakat (*Informal Leader*). Kehadiran ulama/kiyai sebagai *informal leader* sangat boleh jadi memiliki pengaruh yang kadang lebih luas dan tidak dibatasi oleh waktu. Ulama/kiyai hadir di tengah masyarakatnya (komunitasnya) sebagai public figur, oleh sebagian masyarakat dianggap memiliki kelebihan baik dalam peran penengah, pemberi nasehat, memecahkan berbagai persoalan, atau bahkan sebagai *vote getter* dalam pemilu.

Kata kunci: Formal leader, informal leader, legalitas, legitimasi.

### A. Pendahuluan

Dalam suatu analisisnya Fried menyatakan sebagaimana dikutip oleh Imam Tadjri, bahwa masyarakat dengan pola budaya yang sederhana mempunyai sistem kepemimpinan dan politik yang sederhana juga dan pada masyarakat dengan tingkat kebudayaan yang kompleks juga mempunyai sistem kepemimpinan dan politik yang kompleks pula (1984/85, 16).

Masyarakat pedesaan atau sering disebut *rural community* untuk negara Republik Indonesia, memang menempati posisi lebih banyak dibanding yang tinggal di perkotaan. Mereka yang tinggal di pedesaan, dalam pola kehidupan dan budayanya berbeda dengan masyarakat perkotaan (*urban community*).

Masyarakat pedesaan umumnya masih sederhana, baik dalam sistem ekonomi, sosial, atau kepemimpinan. Kendati demikian, kepemimpinan yang terdapat pada masyarakat pedesaan terutama kepemimpinan formal, tidak bisa lepas dari kekuatan politik dari sistem administrasi nasional. Diakui pula, masyarakat pedesaan memiliki sifat dan corak budaya yang beraneka ragam, sehingga tatanan kepemimpinannya pun terutama informal leader memegang peran yang sangat berarti. Tokoh informal leader seperti ulama/kiyai/tuan guru kehadirannya di tengah masyarakat pada awalnya

---

\*Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin.

terbentuk dari aktivitas pendidikan baik dalam wujud pengajian agama atau pondok pesantren. Dari sinilah muncul pengakuan masyarakat akan eksistensi ulama/kiyai sebagai tokoh informal leader yang pengaruhnya kadang melintasi batas wilayah administrasi tapi juga batasan waktu.

## **B. Masyarakat Pedesaan**

Desa, berasal dari bahasa Sankskrit, dari kata *deshi* yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Selanjutnya dari kata *desa* itu merupakan istilah yang menunjukkan "suatu wilayah hukum di Jawa pada umumnya" (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984: 15). Kata yang hampir sama atau sedikit lebih kecil tingkatannya adalah *dusun*, *dukuh*, *kampung*, atau *nagari*, tentunya sesuai bahasa daerah masing-masing.

Istilah *desa* seperti tertuang dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, adalah menunjukkan kesatuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sapari Imam Asy'ari, 1993: 96).

Pemerintahan Desa adalah ujung tombak dari sistem pemerintahan nasional. Dari sudut populasi penduduk, penduduk pedesaan menempati populasi terbanyak dibanding di perkotaan. Masyarakat pedesaan biasanya tinggal terpencar, walaupun terkelompok biasanya terletak di pinggir pantai atau sungai dengan tingkat kepadatan yang tidak tergolong tinggi.

Sistem kekerabatan, antara individu dengan individu dan kelompok masyarakat lainnya merasa lebih dekat. Hubungan sesamanya terasa lebih erat dan mendalam, sifat gotong royong lebih terjalin, hingga anggota-anggotanya seolah-olah merasa dalam suatu keluarga besar. Dari aspek pekerjaan, sesuai kondisi alamnya cenderung lebih terkon-sentrasi pada bidang agraris, kecuali di daerah pantai sebagian besar sebagai nelayan. Mekanisme pertanian lebih diupayakan dengan cara tradisonal, dan hasilnya lebih banyak untuk keperluan dikonsumsi sendiri. Masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, lebih mengutamakan keperluan yang bersifat primer. Keperluan sekunder hampir tidak terlalu tampak. Kondisi rumah dengan berbagai prabotannya, makan, pakaian, dan gaya hidup lainnya lebih menampakkan kesederhanaan.

Ada beberapa ciri umum masyarakat desa, yaitu:

1. Desa merupakan suatu kesatuan kelompok individu yang relatif lebih kecil dari pada kota dan agak jauh-jauh dari pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan dengan kehidupan agraris dalam suatu kesatuan sosio-kultural yang berdasarkan geneologis dan teritorial.
2. Jumlah penduduk relatif jauh lebih kecil dari pada penduduk di kota.
3. Penduduk hidup dalam suatu struktur sosial tradisional

4. Sifat penduduk pedesaan statis, hubungan antar individu kolektif kekeluargaan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara gotong royong (Soedjono D, 1982: 166).

Dari ciri-ciri umum masyarakat desa tersebut lebih mencerminkan adanya suatu dinamika kehidupan warganya yang penuh dengan keterikatan satu sama lain. Bukan itu saja, adat istiadat, tata krama, norma dan ketentuan sosial lainnya termasuk ajaran agama, tertanam dengan kokoh di dalam setiap individu yang ada dalam masyarakat. Karena itu, keterkaitan individu dengan individu lain dalam masyarakat pedesaan sangat kuat. Keterkaitan dimaksud adalah berkenaan kepatuhan masing-masing individu dengan pola dan tata krama berperilaku setiap hari. Berkenaan dengan hal ini, Sapari Imam Asy'ari mengutip pendapat Sanafiah Faizal menyatakan bahwa ciri khas masyarakat desa adalah 1. Sebagai masyarakat keluarga, 2. Sebagai masyarakat paternalistik (1993: 130).

Sebagai masyarakat keluarga; karena setiap individu yang ada di dalamnya sangat boleh jadi awalnya berasal dari satu rumpun keluarga yang terus berkembang membentuk sebuah pedesaan. Tidaklah salah kalau sementara Sosiolog ada yang menyebutkan bahwa masyarakat pedesaan adalah sebuah persekutuan hidup *Peguyuban* seperti yang dikemukakan oleh M.H. Djojodiguno, karena hidup dan pola hubungan kelompok dijalin oleh rasa kekeluargaan, hubungan batin. Istilah lain dari *Peguyuban* adalah *gemeinschaft* seperti diistilahkan oleh Ferdinand Tonnies, atau Mr. Bierens de Hann menyebut '*Gemeenschap*' (M. Cholil Mansyur, t.t.: 69). Adapun ciri-ciri masyarakat *Peguyuban* adalah saling kenal mengenal dengan baik di antara yang satu dengan lainnya, memiliki keintiman yang tinggi, rasa persaudaraan dan persekutuan yang tinggi, jalinan emosional yang kuat, saling bantu membantu, tolong menolong atas dasar kekeluargaan.

Sebagai masyarakat paternalistik; warga masyarakat pedesaan mereka harus tunduk dan patuh pada ketentuan norma, adat istiadat yang berlaku. Salah satu kepatuhan itu adalah terhadap orang tua; baik sebagai ayah atau ibu, atau sebagai orang yang dituakan. Terhadap perilaku yang bertentangan atau sama sekali menentang kehendak orang tua akan mendapat sanksi hukum; celaan, hinaan, dan sebagainya, ataukah yang bersangkutan akan menerima semacam *kualat* dari perbuatannya itu. Kepatuhan akan ajaran agama yang dianutnya diterima dari orang tua (ayah, ibu, ulama/kiyai/tuan guru) harus diamalkan apa adanya. Sangat boleh jadi dalam konstalasi di mana berbagai informasi, komunikasi dan transpormasi sudah merambah masuk ke tengah masyarakat pedesaan, sifat dan ciri-ciri yang terurai di atas masih bertahan, ataukah mengalami perubahan seiring dengan dinamika pembangunan.

### **C. Teori Kepemimpinan**

Istilah kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan seseorang (pimpinan) untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pimpinan tersebut. Adapun yang dimaksud pemimpin masyarakat adalah bagaimana seorang pemimpin di dalam menghadapi masyarakat sebagai bawahan/kaulanya (M. Cholil Mansyur: tt: 165). Sedangkan Suzanne Keller dalam bukunya *Penguasa dan Kelompok Elite* menyebutkan kepemimpinan sosial adalah salah satu kekuatan yang menyangga masyarakat yang teratur (1984, 3). Sementara itu Koentjaraningrat membedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan dari warga masyarakat (1977: 193). Ini berarti dalam diri pemimpin terdapat ada yang merupakan status sosial/kedudukan seperti ayah, lurah, dll. dan ada pula yang merupakan proses karena di dalam pemimpin ditemukan dinamika kerja baik berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Ada tiga unsur pokok yang saling terkait di dalam kepemimpinan yaitu:

#### **1. Power**

Power atau kekuasaan adalah unsur pertama dalam kepemimpinan, dan ini selalu ditemukan dalam setiap lapisan masyarakat. Weber merumuskan kekuasaan sebagai kesempatan dari seseorang atau kelompok untuk mendasarkan masyarakat akan keinginan dan kemauan-kemauan mereka sendiri, dengan sekaligus menerapkan sesuatu (misalnya sangsi) terhadap tindakan perlawanan dari orang atau group-group (DA. Wila Huky: 1982: 180). Sementara Lewin seperti dikutip Roderick Martin mengemukakan, kekuasaan adalah kemampuan potensial dari seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi yang lainnya di dalam sistem yang ada (1990: 71).

Kekuasaan sendiri mempunyai sifat netral, artinya kekuasaan itu tidak baik atau tidak buruk, tetapi baik dan buruk terletak dalam penggunaan kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan ini ditemukan hampir di semua bidang kehidupan manusia, kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam suatu organisasi dinamakan negara. Negara mempunyai kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan dengan jalan wajar atau kekerasan. Negara pulalah yang membagi-bagi kekuasaan dari tingkat pusat sampai ke tingkat pedesaan. Inilah disebut 'kedaulatan (*Sovereignty*), yang dijalankan oleh 'sekelompok orang (*the ruling class*)' (Soerjono Soekanto: 1982: 263).

Kekuasaan yang melekat dalam diri masyarakat kalau dijemakan pada diri individu, disebut dengan 'pemimpin', sementara orang atau kelompok yang menerima pengaruhnya dinamakan 'pengikut' atau 'bawahan'.

Ada beberapa sifat yang perlu dimiliki oleh seseorang pemimpin dalam upaya untuk lebih menanamkan pengaruhnya, yaitu:

- a. Sifat-sifat yang disenangi oleh warga masyarakat pada umumnya.
- b. Sifat-sifat yang menjadi cita-cita dari banyak warga masyarakat dan yang karena itu suka ditiru.
- c. Keahlian yang diperlukan dan diakui oleh warga masyarakat.
- d. Pengesahan resmi atau legitimasi, menurut prosedur yang telah oleh adat masyarakat ybs.
- e. Sifat hormat menurut pandangan umum dalam masyarakat.
- f. Lambang-lambang pimpinan resmi yang telah ditentukan oleh adat dalam masyarakat.
- g. Kemampuan untuk menggunakan kekuatan fisik yang nyata (Koentjaraningrat: 1977: 193).

## **2. Otoritas**

Otoritas atau wewenang sebagaimana kekuasaan juga ditemukan dalam tiap lapisan masyarakat. Wewenang ini berbeda dengan kekuasaan. Menurut Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedang wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang dengan mendapat pengakuan dari masyarakat (1964: 338). Ada dua type dasar wewenang: Pertama, yang diletakkan di dalam jabatan. Kedua, wewenang yang diberikan kepada seorang pemimpin (Karl Mannheim, 1987, 147). Untuk wewenang pertama dapat dilihat pada jabatan pemerintahan (*formal leader*), sedang wewenang kedua pada diri informal leader; seperti ulama, kiyai, tuan guru dan sebagainya.

Wewenang sangat perlu dalam kekuasaan, karena kekuasaan tanpa wewenang tidak sah, sebab tidak mendapat pengakuan dan pengesahan (*legitimasi*) dari masyarakat. Itulah sebabnya, kekuasaan perlu disertai dengan wewenang. Jelasnya wewenang adalah merupakan hak jabatan yang sah untuk memerintahkan orang lain agar bertindak sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh orang yang berwenang. Dalam kaitan ini, Max Weber membagi otoritas ini dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Otoritas legal-rasional
- b. Otoritas tradisional
- c. Otoritas kharismatik\* (Bruce J Cohen: 1983: 413)

---

\*P.J. Bouman mengistilahkan dengan tiga bentuk pimpinan: 1. Pimpinan yang tradisional, 2. Pimpinan yang berdasarkan pertimbangan akal, dan 3. Pimpinan yang kharismatik (1980: 34)

Otoritas legal-rasional adalah wewenang yang didasarkan atas hukum yang berlaku. Sistem hukum yang berlaku bisa saja bersandar pada agama atau tradisi yang ada. Waktu berlakunya otoritas legal-rasional ini terbatas (sesuai dengan hukum itu sendiri), begitu pula dalam pelaksanaannya tidak terpusat pada satu tangan, tetapi terdapat pembagian wewenang. Jenis wewenang ini biasanya terdapat dalam bentuk pemerintahan dengan sistem demokratis.

Otoritas tradisional adalah wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang memang wewenang dan kekuasaan ini sudah tertanam sejak lama dalam dirinya. Dalam wewenang tradisional ini terkadang tidak jelas ditemukan adanya kemampuan yang dimilikinya, tetapi hanya sekedar wewenang karena keturunan, atau bisa juga karena terlalu lama dalam memegang kekuasaan. Jenis wewenang ini bisa memudar atau hilang tergantung pada perkembangan masyarakat itu sendiri. Wewenang macam ini ditemukan dalam bentuk pemerintahan monarki (kerajaan), atau juga dalam kasta-kasta, dan mungkin juga dalam masyarakat biasa.

Otoritas kharismatik adalah merupakan otoritas yang dimiliki seseorang yang memang diperolehnya karena anugerah dari tuhan, di mana pelimpahan kekuasaan dianggap keramat. Wewenang ini merupakan anugerah dari tuhan dan ini diakui oleh orang lain yang berada di luar kemampuan manusia biasa, itulah sebabnya sering bersifat irrasional. Jenis wewenang yang seperti ini biasanya mampu bertahan sepanjang hayat dikandung badan, atau bisa juga hanya selama kemampuan yang dimilikinya itu masih terbukti hingga selama itu pula kepercayaan masyarakat mampu bertahan. Contoh wewenang seperti ini umumnya terdapat pada diri tokoh-tokoh agama, atau tokoh-tokoh sejarah.

Ketiga wewenang tersebut kalau dilihat lebih jauh, maka masih saja ditemukan masyarakat yang sudah maju, tetapi mungkin hanya salah satu di antara ketiga wewenang tersebut terlihat menonjol.

### **3. Popularitas**

Pemimpin yang pada dirinya terhimpun sifat-sifat yang baik, sehingga para pengikutnya menyenangi terhadap gaya kepemimpinannya, biasanya pemimpin seperti ini populer. Unsur kepopuleran ini adalah penting dalam upaya untuk lebih menarik simpati dan pengikut yang lebih besar. Diakui, ada pemimpin yang populer karena kebaikan dan kebijakan dalam melaksanakan kepemimpinan, ini lebih menguntungkan bagi ybs. dalam upaya untuk lebih menanamkan kepemimpinannya. Sebaliknya populer karena ketidakbecosan dalam memimpin, ini akan menjatuhkan posisinya di mata masyarakat (pengikut)-nya.

## **D. Kepemimpinan Di Kalangan Masyarakat Pedesaan**

### **1. Formal Leader**

Pada masyarakat pedesaan, di mana sifat heterogenitasnya hampir tidak ada (homogenitas), dengan berbagai variasi pola kehidupan lebih sederhana, bentuk kepemimpinannya pun sangat sederhana.

Kepemimpinan yang bersifat resmi (*Formal Leadership*) adalah kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan, seperti kepala desa dan perangkatnya. Kepala Desa dan perangkatnya adalah perwujudan dari sistem kepemimpinan yang bersumber pada sistem administrasi nasional.

Corak kepemimpinan pada masyarakat pedesaan ada yang bersifat resmi (*Formal Leader*), dan secara tidak langsung (*Indirect*). Dengan kata lain, kepemimpinannya dipilih dan diangkat dengan berbagai prosedur. Dalam melaksanakan dinamika pemerintahan umumnya melalui jalur birokrasi (jenjang kekuasaan). Hal ini dimaklumi, mengingat setiap jenjang (bagian) sudah diberikan kekuasaan dan wewenang oleh atasan, walaupun untuk di pedesaan tidak terlalu tampak, artinya perangkat desa memang ada tetapi tidak atau kurang berfungsi. Dalam pelaksanaannya harus selalu berada di atas landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi, dengan demikian daya cakupan dari penguasa seperti ini terbatas sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sinilah letaknya power dan otoritas yang ada di tangan mereka, lebih banyak berdasarkan pada legalisasi (sah sesuai undang-undang). Kendati demikian, tidak setiap pimpinan resmi (*Formal Leader*) selalu mendapat legitimasi (pengakuan) masyarakat, sebab ia tumbuh dari atas bukan kehendak dari bawah. Tidak jarang terjadi seorang Kepala Desa yang terpilih tidak atau kurang mendapat legitimasi dari warganya, mungkin karena perbedaan kelompok (berseberangan) atau pimpinan yang dipaksakan atau sebab lain. Di sinilah adanya perbedaan antara legalisasi dengan legitimasi, di mana pemimpin yang resmi (*formal leader*) belum - (apalagi bila ia tidak cakap menggunakan wewenang yang dipercayakan kepadanya) mungkin legal tetapi dianggap tidak legitim, sebab tidak mendapat dukungan/pengakuan masyarakatnya (Phil Astrid Susanto, 1979; 30).

Penempatan seorang pemimpin resmi bisa saja mendapat legitimasi oleh warga masyarakat, karena yang bersangkutan memang pada awalnya menjadi tokoh dalam masyarakat, selanjutnya oleh masyarakat dipilih sebagai pimpinan formal (Kepala Desa). Tetapi bisa pula sebaliknya, sehingga akan timbul sikap apatis masyarakat terhadap kepemimpinan yang ada.

Semakin maju suatu bangsa, maka tingkat kualitas pemimpin pun semakin dituntut. Sangat boleh jadi untuk masa lalu, keberanian, heritage (keturunan), dan kekuatan, modal dasar seseorang untuk menjadi kepala desa (*formal leader*), namun untuk masa sekarang ini modal itu saja tidak cukup, seseorang harus punya kecerdasan, kecakapan, dan kemampuan.

Karena itu tingkat pendidikan untuk jabatan kepala desa juga menjadi bahan pertimbangan.

## **2. Informal Leader**

Dalam teks-teks selalu ditekankan bahwa ulama (dalam istilah lain *tuan guru, kiyai, guru agama*) adalah "Pewaris Nabi" (*warasaatul anbiya*). Kehadiran ulama/kiyai di tengah masyarakatnya tidak terkecuali masyarakat pedesaan berperan sebagai figur moral dan pemimpinan sosial.

Istilah ulama, bentuk jamak dari alim berarti orang yang memiliki pengetahuan. Dalam masyarakat muslim, istilah ulama (alim) adalah orang memiliki pengetahuan agama Islam (Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, 1990; 984). Sebutan ulama di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda, *Tuan Guru* (NTB dan Kalimantan), *Kiyai* (Jawa), *Tengku* (Aceh), dll.

Istilah *informal leader* atau pemimpin tak resmi adalah pemimpin yang berada di luar kepemimpinan resmi seperti Kepala Desa. Kehadiran *informal leader* atau pemimpin tak resmi semacam tokoh agama (ulama/kiyai), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, atau yang lainnya di masyarakat pedesaan punya arti yang sangat dalam apalagi yang bersangkutan punya kemampuan (intelektualitas dan sosial aproach) yang memadai. Dengan kata lain, di samping memiliki otoritas kharismatik juga ditunjang oleh kemampuan wawasan dan pengetahuan. Umumnya keberadaan pemimpin tak resmi utamanya tokoh agama (ulama/kiyai) tidak mengidentifikasi diri sebagai penguasa (pemimpin). Tetapi keberadaan mereka lebih banyak disebabkan sebagai tokoh sentral yang ekstensinya lebih didasari atas legitimasi masyarakat.

Ulama/kiyai misalnya, pangkat dan jabatan sebagai 'kiyai' atau 'ulama' bukanlah berdasar surat keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa (*formal leader*) tetapi hanyalah bertumpu pada pengakuan masyarakat. Pengakuan ini muncul, selain karena ulama/kiyai sebagai pewaris para nabi (*warasatul anbiya*), kemampuan dan penguasaan ilmu agama serta akhlakul karimah (*tawaddu'*). Pengajian agama dan pondok pesantren di mana proses transmisi dan tranpormasi keilmuan berlangsung, menjadi tempat munculnya pengakuan oleh santri dan jamaahnya (*ummah*). Ibnu Qoyim Isma'il dalam mengutip pendapat Sartono Kartodirdjo menyatakan kelebihan yang disandang seseorang sebagai ulama atau kiyai ikut mendorongnya mendapatkan otoritas kharismatik sebagai elit religius, yang selanjutnya menjadi kekuatan yang tidak kelihatan, tetapi dapat dirasakan melalui pengaruhnya yang besar di kalangan rakyat dan membawanya sebagai 'key person' masyarakat desanya (1997, 60). Ulama/kiyai juga menempati posisi tertinggi dalam stratifikasi sosial di tengah masyarakatnya. Alfani Daud menyebutkan semua praktik keagamaan yang mereka lakukan dan ilmu-ilmu yang menjadi monopoli mereka, yang kesemuanya itu menyangkut hal-hal yang serba gaib menyebabkan kaum agama ini sangat dihormati dan disegani oleh penduduk

sekitarnya (1977; 12). Di kalangan masyarakat Banjar, ulama dan guru agama menempati strata yang lebih tinggi dari pada orang-orang awam. Para ulama dan guru agama dihormati dan disegani karena keluasan dan kedalaman agamanya yang tercermin pada tingkah lakunya. Karena dianggap sebagai pemimpin masyarakat, kepadanya orang-orang awam meminta tolong memecahkan masalah-masalah keagamaan maupun masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan agama (Tim Peneliti, 1982; 25).

Kiyai, selain sebagai pimpinan pondok juga sebagai ulama. Karena itu mereka tidak saja milik warga pesantren, namun juga milik masyarakat. Sebagai pimpinan pondok, mereka memiliki sekian banyak santri, yang berasal dari berbagai pelosok daerah. Keberadaan santri yang berasal dari berbagai daerah, tentunya membawa pengaruh dari transmisi keilmuan yang diterima dari pondok pesantren di mana dia nyantri, atau lebih khusus dari kiyai pimpinan pondok yang bersangkutan. Demikian pula mana kala ia sudah menjadi alumni, tentu ia pun akan mentransmisikan dan mensosialisasikan ilmu dan amalan yang diterima dari kiyai yang bersangkutan. Sebagai alumni yang berada di daerahnya masing-masing, ada yang menjadi guru agama, ulama dan bahkan menjadi pimpinan pondok akan terimplementasi dalam pola dan perilaku kehidupan, tentunya turut menambah luasnya wibawa, pengaruh dari kiyai yang dulu pernah menjadi anutan mereka. Dalam kaitan ini, tidak jarang, di kalangan santri, alumni dari pondok pesantren yang bersangkutan setiap tahunnya menyelenggarakan acara "hulan" terhadap kiyai yang menjadi anutannya, manakala kiyai yang bersangkutan kembali ke hadirat Ilahi Rabbi sekaligus ziarah ke makam kuburan tokoh yang bersangkutan.

Keberadaan kiyai atau ulama di tengah masyarakat selain sebagai figur juga anutan sekaligus sebagai *informal leader* memiliki masa atau pengikut. Kelebihan yang disandang seseorang sebagai ulama ikut mendorongnya mendapatkan otoritas kharismatik sebagai elit religius, elit masyarakat memiliki pengaruh yang besar di kalangan rakyat dan membawanya sebagai tokoh anutan masyarakatnya. Peran ulama/kiyai (tokoh agama) di tengah masyarakat terasa sangat kentara. Tidak saja dalam persoalan keagamaan, namun juga berbagai aspek kehidupan, menjadikan Ulama/kiyai sebagai tumpuan harapan masyarakat. Berbagai sengketa, perselisihan, persoalan rumah tangga, seringkali menjadikan mereka sebagai tempat penyelesaian. Figur ulama/kiyai sebagai tokoh kharismatik, selain menjadi pelita kehidupan, juga menjadi anutan dalam hidup keseharian. Karena itu sebagai *Informal Leader* seringkali petatah petitih atau kata-katanya menjadi kata *putus* bagi masyarakatnya.

Dalam kaitan tersebut di atas, Fuaduddin menyatakan, pesantren secara kelembagaan diakui oleh masyarakat sebagai wadah yang melahirkan kepemimpinan agama. Kepemimpinan tersebut selain karena memiliki otoritas keilmuan juga diyakini kiyai sebagai pemimpin spritual keagamaan yang memberikan rasa aman, membantu menyelesaikan masalah-masalah keseharian dibarengi dengan rasa ta'dhim dan kharisma (2003; 7).

Pradjata Dirdjosanjoto dalam bukunya *Memelihara Umat Kiyai Pesantren – Kiyai Langgar di Jawa*, dengan baik melukiskan, bagaimana kiyai sebagai elite penentu sebagai berikut: Keunggulan kiyai di bidang keagamaan, kedudukan mereka sebagai intelektual desa dan pandangan masyarakat bahwa mereka merupakan orang-orang yang memiliki kekuatan spritual serta kebajikan melebihi orang kebanyakan, menenpatkan para kiyai sebagai sebagai guru ahli agama, juga sebagai bagian dari orang terkemuka di pedesaan. Dalam kehidupan sehari-hari, penduduk desa sering datang kepada mereka untuk meminta nasehat dalam berbagai macam persoalan, mencari obat, atau memohon jasa mereka menjadi penengah dalam berbagai perselisihan. Dalam berbagai peristiwa penting yang terjadi di desa, pendapat para kiyai sering memiliki pengaruh yang luas. (1999; 216).

Sewaktu pemerintahan Orde Baru, ulama/kiyai dimanfaatkan oleh golongan dan partai politik. Di kalangan pimpinan pondok pesantren ada yang menjadi anggota golongan atau partai politik lain. Keberadaan mereka dalam suatu golongan atau partai politik sesungguhnya memiliki nilai tambah dari golongan atau partai politik yang bersangkutan. Ini dapat dipahami, mengingat keberadaan kiyai sebagai “public figur” memiliki banyak pengikut (ummat) di belakangnya.

Saat inipun para pejabat, tokoh partai, atau para caleg tidak jarang berkunjung ke tempat pengajian atau pondok pesantren di mana ulama/kiyai berada, dalam rangkaian silaturahmi atau “safari politik” sekaligus pendekatan untuk tujuan politis, dengan harapan mendapat “berkah” dari ulama/kiyai yang dikunjungi, seolah-olah mendapat restu atau sebagai “vote getter” mendulang suara.

Kendati demikian, dampak dari adanya patron-patron yang seperti itu, sering menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. Adakalanya seorang ulama/kiyai semula sangat dihormati dan disegani sebagai figur yang mampu mengayomi masyarakatnya, harus berhadapan dengan tantangan dari pendukung lainnya. Pada gilirannya, kredibilitas, wibawa dan kharismatik tokoh yang bersangkutan mengalami penurunan, bahkan sering memunculkan sindiran. Kondisi ini tentu, kurang menguntungkan bagi perkembangan umat Islam.

Terhadap ulama/kiyai yang memiliki kemampuan bertahan (dalam posisi netral), dia tidak melihat ke kiri atau kanan, yang penting menegakkan kebenaran ajaran agama, posisi mereka di tengah masyarakat mengalami kedudukan yang kuat. Masyarakat menghormatinya sebagai pimpinan yang istiqamah mampu bertahan dari berbagai godaan, bujukan dan rayuan.

Sebenarnya, keberadaan ulama/kiyai dalam golongan atau partai politik bukanlah tidak dibenarkan. Persoalan ini sah-sah saja, sepanjang berjalan dalam koridor dan tatanan hukum yang berlaku. Namun terkadang, sangaja atau tidak sangaja, sadar atau tidak, tokoh ini terbawa arus ke dalam permainan politik yang kadangkala tidak selalu sejalan bahkan berseberangan dengan persepsi, pandangan dan aspirasi masyarakat. Munculnya perbedaan dalam

“wadah” di mana tokoh ini berada, sesuai aspirasi politik yang menurutnya “lebih sesuai”, adalah hal biasa, apalagi dalam kancah perpolitikan “demokrasi” di Indonesia, di mana orang bebas untuk menentukan aspirasi politiknya. Namun saja, hal ini sering kali memunculkan persepsi dan pandangan yang “minor” terhadap tokoh yang bersangkutan, terutama kalau ini dilihat dari kecamata anggota masyarakat yang berbeda aspirasi politiknya. Bahkan sering kali memunculkan label-label yang kurang menyenangkan terhadap kiyai yang bersangkutan, “ulama/kiyai ini, ulama/kiyai itu”. Namun sebaliknya, kalau tokoh ini sejalan dengan persepsi, pandangan dan aspirasi “politik” masyarakat, posisi dan kedudukannya akan semakin kuat, ia mendapat legitimasi di tengah masyarakat.

Peran pemimpin tak resmi dalam turut menanamkan legitimasi bagi kehadiran pemimpin formal di tengah masyarakatnya sangat membantu. Hal ini dimungkinkan, mengingat keberadaan pemimpin informal adalah “kata putus” bagi masyarakat pendukungnya. Dalam hal kemitraan ini, lebih banyak dalam upaya penerapan kebijakan yang telah dibuat. Di sini, peran pemimpin informal dalam upaya menggugah masyarakat sangat diperlukan. Sedang kemitraan dalam bentuk pembuatan peraturan, peran pemimpin informal juga turut membantu baik dalam bentuk pembuatan kebijakan, atau dalam penerapannya. Tokoh semacam ini sering ditempatkan dalam perangkat desa (LKMD) atau diminta pendapat, saran dan nasehatnya secara pribadi.

Kepemimpinan adalah merupakan produk dari pada organisasi sosial (*social organization*) yang telah dibentuk, atau bisa pula sebagai hasil dinamika dari interaksi sosial. Justeru itulah, sifat yang disyaratkan bagi seorang pemimpin (formal atau informal) bisa saja terjadi perbedaan.

Barangkali untuk menggambarkan sifat-sifat kepemimpinan yang lebih cocok untuk sebagian besar bangsa Indonesia (desa atau kota) adalah orang yang memiliki sifat di muka memberi tauladan, di tengah membangun semangat, dan dari belakang memberi pengaruh. Atau dalam istilah lain, seorang pemimpin harus mampu berada di muka; harus mampu berkomunikasi dengan pihak atas, berada di di tengah; harus mampu berkomunikasi dengan sesama koleganya, di belakang; harus mampu berkomunikasi dan membawa aspirasi masyarakat. Istilah ini dikenal pula dengan *Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tut wuri handayani*. Untuk kepemimpinan yang seperti ini dijabarkan dalam sifat-sifat yang harus dimilikinya yaitu: takwa, taat, temen (jujur), tekun, terampil, tanggap, trengginas (lincah), tegas, tangguh, tanggon (iman), terbuka, toleran, teliti, tertib, tepo seliro, tanpa pamrih, dan tanggungjawab (M. Ngalim Purwanto, 1988; 59). Seorang pemimpin harus mempunyai sandaran-sandaran kemasyarakatan atau *sosial basic* yang mencakup susunan masyarakat serta *culture focus* dari pada masyarakat yang bersangkutan. Di sinilah letaknya, bentuk dan pola kepemimpinan di Indonesia lebih bersendi pada 'Demokrasi Pancasila' terlepas dari warga masyarakat pedesaan maupun perkotaan.

#### **E. Penutup**

Kepemimpinan di kalangan masyarakat pedesaan ada dua. Pertama, kalangan pemimpin resmi (*Formal Leader*) yaitu Kepala Desa dan perangkatnya. Untuk ini lebih banyak berdasar pada ligalisasi perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan pemimpin ini terbatas, terbatas oleh wilayah kerja dan terbatas oleh waktu karena dibatasi oleh sistem yang berlaku. Karena dibatasi oleh waktu (masa jabatan), sering disebut mantan (ketika habis masa jabatan). Kedua, pimpinan tak resmi (*Informal Leader*) seperti elite keagamaan; Ulama/kiyai. Ekstensi kepemimpinannya didasari oleh legitimasi (pengakuan) masyarakat, sesuai syarat dan ukuran yang disepakati oleh masyarakat. Keberadaan ulama/kiyai ini kadang melebihi keberadaan *formal leader*, karena tidak mengenal batas wilayah dan batas waktu jabatan, sehingga tidak ada istilah 'mantan' ulama/kiyai, bahkan setelah meninggal duniapun tetap dihormati.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asy'ari, Sapari Imam, *Sosiologi Kota dan Desa*, Usaha Nasional, Surabaya, 1992.
- Bouman, P.J., *Ilmu Masyarakat Pengantar Sosiologi* (Terj. H.B. Yassin), PT. Pembangunan, Jakarta, 1980.
- Cohen, Bruce J., *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Terj. Drs. Suhut Sitomora), Bina Aksara, Jakarta. 1983.
- Daud, Alfani, *Ulama Dalam Masyarakat Banjar: Ulama, Islam dan Kebudayaan Daerah* (Ringkasan Laporan Penelitian), Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta, 1977.
- , *Islam dan Masyarakat Banjar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.
- Huky, DA. Wila, *Pengantar Sosiologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.
- Isma'il, Ibnu Qoyim, *Kiai Penghulu Jawa Perannya Di Masa Kolonial*, Gema Insani Press, Jakarta. 1997.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo, *Desa*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Keller, Suzanne, *Penguasa dan Kelompok Elite*, (Terj. Zahara D. Noor), Yayasan Ilmu Ilmu Sosial, Jakarta, 1984.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1977.
- Mansyur, M. Cholil, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Usaha Nasional, Surabaya, t.t.
- Mannheim, Karl, *Sosiologi Sistematis Suatu Pengantar Studi Tentang Masyarakat*, (Terj. D. Alimandan) Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Marten, Roderick, *Sosiologi Kekuasaan*, (Terj. Herry Joediono), Gramedia, Jakarta, 1990.
- Purwanto, M. Ngalm, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Karya CV, Bandung, 1988.
- Susanto, Phil Astrid S., *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta, Bandung, 1979.

Soemardi, Selo Soemardjan dan Soeleman, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1964.

Soedjono D., *Sosiologi Pengantar Untuk Masyarakat Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.

Soekanto, Soerdjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

Tadjri, Imam, *Sistem Kepemimpinan Masyarakat Pedesaan di Daerah Kalimantan Selatan (Studi Kasus di Desa Pagat dan Tilahan Kabupaten HSS)*, Bahan Seminar Disampaikan pada Pertemuan Rutin Ikatan Alumni Peserta PLPIIS, di Banjarmasin, 1984/85.

Tim Penelitian Lapangan Daerah Tk I Propinsi Kalimantan Selatan dengan Bantuan Lembaga Riset dan Survei IAIN Antasari Banjarmasin, *Laporan Hasil Penelitian "Pembinaan Serta Pemupukan Tata Nilai Sosial-Budaya Dalaam Keluarga Indonesia (Studi Kasus Pada Tiga Lokasi Di Kalimantan Selatan)*, Lembaga Ilmiah dan Penerbitan IAIN Antasari Banjarmasin, 1982.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.